



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS SYARIAT ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAHROL FAJRI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 523923

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.629.520.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/145 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1074 m2/1074 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 171.840.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 629 m2/629 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 100.640.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1794 m2/1794 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 287.040.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m2/186 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 222.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOTOR, YAMAHA B6H A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000
3. MOBIL, HONDA JEZZ 1.5 RS CVT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 229.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 380.936.129

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.461.456.129



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.461.456.129

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.